



**KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

# **Pembangunan Zona Integritas**

---

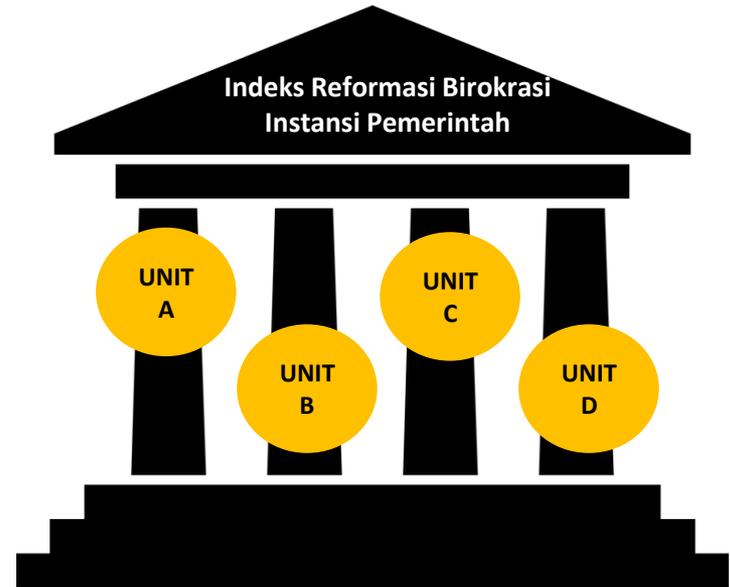
**Juni, 2021**

# Pembangunan Zona Integritas

## Miniaturn Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia

Bertujuan untuk membangun program RB sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas

Membangun percontohan (*Role Model*) pada tingkat unit kerja pada Instansi Pemerintah sebagai unit menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani



## UNIT PERCONTOHAN

1. Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik
2. Mengelola sumber daya yang cukup besar
3. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut

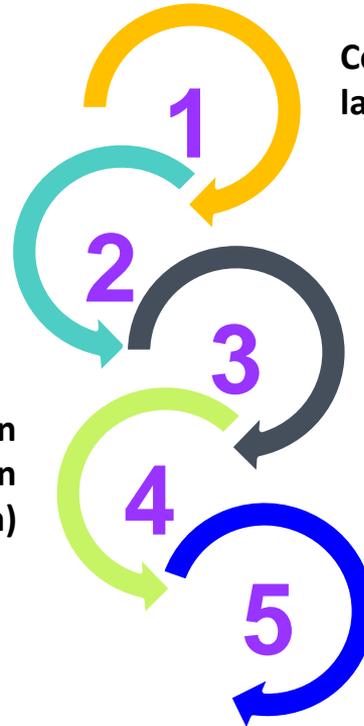


# Skala Prioritas Unit Zona Integritas

---

Core Bussiness dan **tidak** berhubungan langsung dengan masyarakat, **tapi** dengan customer lainnya (misal: K/L/P lain)

**Bukan** Core Bussiness, **tidak** berhubungan langsung dengan masyarakat, **tapi** dengan customer lainnya (misal: K/L/P lain)



Core Bussiness dan berhubungan langsung dengan masyarakat

**Bukan** Core Bussiness dan berhubungan langsung dengan masyarakat

Supporting Internal



# Fokus 3 sasaran ZI

## 1. INTEGRITAS

Fokus dalam pencegahan KKN melalui pengendalian dan pengawasan internal terhadap seluruh resiko penyimpangan integritas



## 2. PELAYANAN PUBLIK PRIMA

Fokus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong kepuasan penerima layanan



## 3. KAPABILITAS

Fokus untuk mengoptimalkan kinerja unit kerja dengan melakukan dan meningkatkan kualitas manajemen kinerja



# 7 Kunci Pembangunan Zona Integritas

ZST	DPMO	REMARKS
6	3,4	World-Class
5	2,33	Significantly Above Average
4,2	3470	Above Industry Average
4	6210	Industry Average
3	66800	Industry Average
2	308500	Below Industry Average
1	691500	Not Competitive



Roadmap RB/ Rencana Kerja RB

Renstra/ Rencana Kinerja



MONITORING DAN EVALUASI



# KRITERIA WBBM

## ROLE MODEL

Sebagai penggerak unit lain untuk berubah.



## BUKAN WBK + WBK

Inovasi di WBBM lebih bermanfaat dari inovasi saat WBK



## KINERJA

Perencanaan dan Pencapaian kinerja yang sudah baik

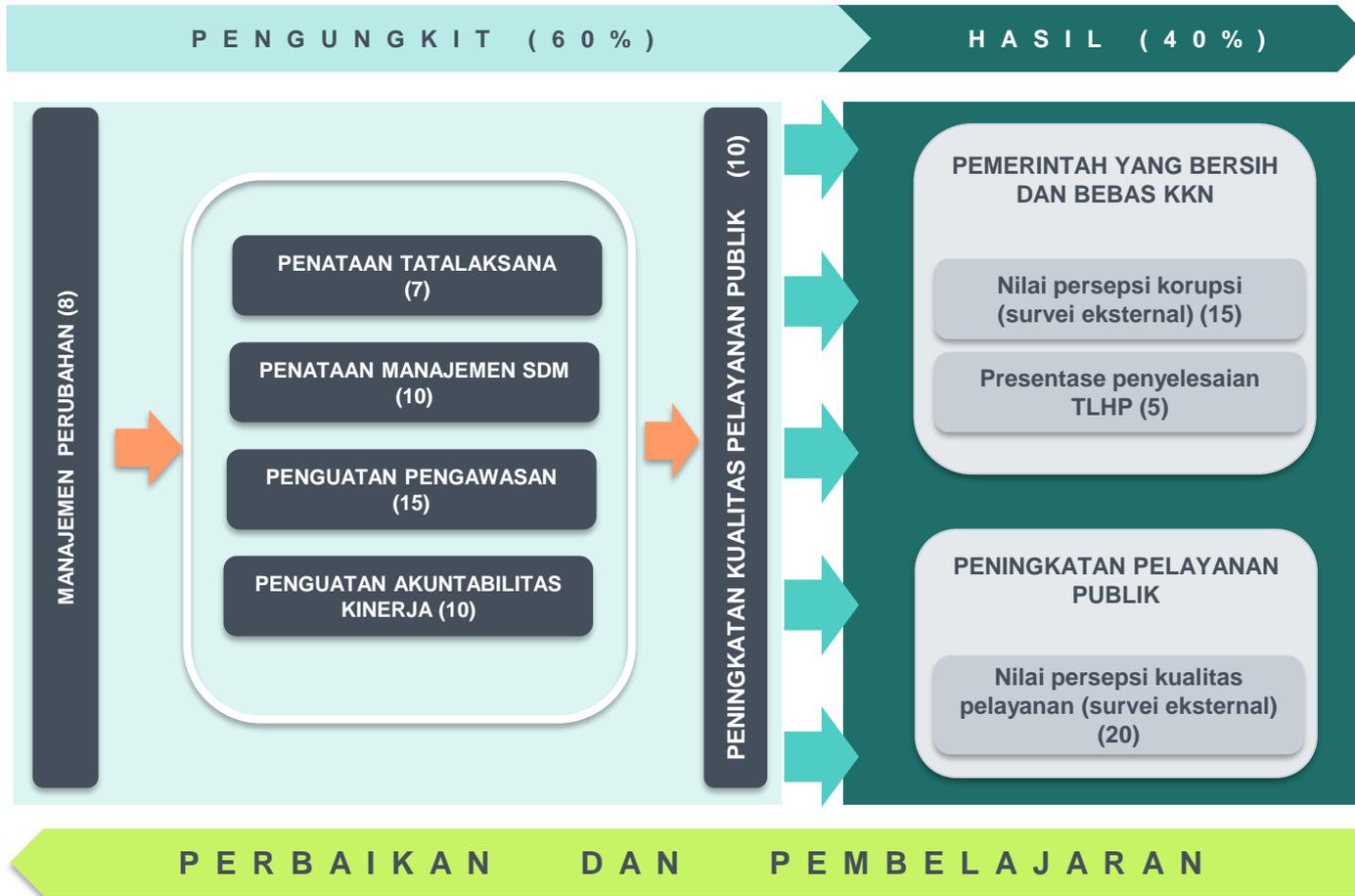


## MANAJEMEN KINERJA

Kinerja telah dikelola secara manajerial



# Kerangka Logis Pelaksanaan ZI



# Syarat Pengusulan

PERMENPANRB 10/2019

Syarat	No	WBK	WBBM
Tingkat instansi pemerintah	1	Opini BPK minimal "WDP"	Opini BPK minimal "WTP"
	2	Nilai Akip minimal "B"	
Tingkat unit kerja	3	Unit kerja yang diajukan merupakan <i>core</i> layanan utama dari instansinya	
	4	Mengelola sumber daya yang cukup besar	
	5	Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut	
	6		Telah mendapat predikat WBK sebelumnya
	7	LHKASN dan LHKPN 100%	

# Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBK dan WBBM

PERMENPANRB 10/2019

SYARAT	WBK	WBBM
Nilai Total	75	85
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal	18,50	18,50
Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	13,5 (survey 3,60)	13,5 (survey 3,60)
Nilai sub-komponen "Persentasi TLHP" minimal	5,0	5,0
Nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal	16 (survey 3,2)	18 (survey 3,60)

## PERBEDAAN WBK & WBBM

1. Tingkat kematangan implementasi perubahan
2. Tingkat keberlanjutan perubahan
3. Tingkat Kualitas Pelayanan dan kinerja



# Terimakasih

---



**KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**